Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 388-408
DOI: https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.245.
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Konstruksi Kepercayaan Politik Generasi Z di Tengah Disinformasi Politik Pasca Pemilu 2024 (Studi pada Mahasiswa International Women University)

Wanda Fitria[1], Umi Narimawati[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

Abstract. *This study aims to analyze the construction of political trust among generation Z amid political disinformation following the 2024 general election, it's impact on political participation, and its contribution to the entrepreneurial vision of generation Z. this study employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and documentation. The research informants consisted of students at International Women University and lecturers as supporting informants, selected through purposive sampling. The findings show that political trust among generation Z is constructed through a process of receiving, interpreting, filtering, and evaluating political information, particularly information obtained through social media. Political disinformation can generate doubt and skepticsm toward the government, but it also encourages some students to become more critical and selective in receiving information. This condition also affects political participation, both by encouraging critical angagement and by potentially generating apathy. Furthermore, the ability to verify information and make fact-based decisions is relevant to the development of an entrepreneurial mindset. Thus, political trust among generation Z following the 2024 general election tends to be critical, selective, and evaluative.*

Keywords: *Generation Z, Political Trust, Disinformation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kepercayaan politik generasi Z di tengah disinformasi politik pasca Pemilu 2024, dampaknya terhadap partisipasi politik, serta kontribusinya terhadap visi entrepreneur generasi Z. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari mahasiswa International Women University dan dosen sebagai informan pendukung yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan politik generasi Z terbentuk emlalui proses penerimaan, pemaknaan, penyaringan, dan evaluasi terhadap informasi politik, terutama yang diperoleh melalui media sosial. Disinformasi dapat menimbulkan keraguan dan skeptisisme terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong sebagian mahasiswa menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi. Kondisi tersebut turut memengaruhi partisipasi politik, baik dalam mendorong keterlibatan yang kritis mapun menimbulkan kecenderungan apatis. Selain itu, kemampuan memverifikasi informasi dan mengambil keputusan berdasarkan fakta memiliki relevansi dengan pembentukan karakter entrepreneur. Dengan demikian, kepercayaan politik generasi Z pasca pemilu 2024 cenderung bersifat kritis, selektif, dan evaluative.

Kata kunci: Generasi Z, Kepercayaan Politik, Disinformasi.

Received Oktober 15, 2026; Revised Oktober 29, 2026; Accepted November 01, 2026
* Wanda Fitria, fitriawanda7@gmail.com

LATAR BELAKANG

Transformasi ekosistem informasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami politik, membentuk opini, dan mengevaluasi institusi demokrasi. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi medium komunikasi interpersonal, tetapi juga berkembang sebagai ruang produksi, distribusi, dan negosiasi makna politik. Dalam demokrasi kontemporer, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, media sosial memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik dan membuka ruang partisipasi yang lebih horizontal. Di sisi lain, karakteristiknya yang cepat, interaktif, dan berbasis algoritma menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran misinformasi dan disinformasi. Hunter (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial, disinformasi, dan kualitas demokrasi bersifat kompleks, bergantung pada intensitas penggunaan, jenis aktivitas, serta karakter informasi yang beredar. Sementara itu, Mont'Alverne et al. (2024) menemukan bahwa keyakinan terhadap misinformasi pemilu dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap berita dan institusi elektoral. Dengan demikian, disinformasi politik bukan hanya persoalan akurasi informasi, melainkan juga persoalan demokrasi yang berpotensi memengaruhi legitimasi dan kepercayaan politik masyarakat.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dalam lingkungan digital. Kedekatan generasi ini dengan teknologi tidak secara otomatis menjamin kemampuan dalam mengidentifikasi disinformasi. Fernández Muñoz et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun Generasi Z memiliki tingkat paparan media sosial yang tinggi, perhatian terhadap persoalan disinformasi belum tentu sebanding dengan intensitas penggunaannya. Selanjutnya, van Zoonen et al. (2024), melalui penelitian terhadap 2.600 responden yang sebagian besar berasal dari Generasi Z dan Milenial, menemukan bahwa kepercayaan terhadap institusi dapat meningkatkan keyakinan individu terhadap kemampuannya mendeteksi informasi, tetapi sekaligus menurunkan motivasi untuk melakukan autentikasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan dan perilaku verifikasi informasi memiliki hubungan yang kompleks, sehingga penerimaan informasi politik perlu dipahami melalui proses interpretasi dan evaluasi individu.

Dalam konteks tersebut, kepercayaan politik (political trust) menjadi aspek fundamental karena berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap institusi, proses pemerintahan, dan sistem demokrasi. Devine (2024), melalui meta-analisis terhadap 61 penelitian dengan 329 estimasi dan lebih dari 3,6 juta observasi, menemukan bahwa kepercayaan politik memiliki hubungan lemah hingga moderat dengan partisipasi pemilih, pilihan politik, preferensi kebijakan, dan kepatuhan. Sementara itu, Devine dan Valgårðsson (2024), berdasarkan enam studi panel, menunjukkan bahwa kepercayaan politik dapat berubah sebagai respons terhadap konteks dan pengalaman politik. Artinya, political trust bukanlah sikap yang sepenuhnya stabil, melainkan hasil evaluasi individu terhadap informasi, pengalaman, dan kondisi politik yang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann sebagai grand theory untuk memahami pembentukan kepercayaan politik. Teori tersebut menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam lingkungan politik digital, proses ini berlangsung ketika individu menerima informasi, berinteraksi dengan pengguna lain, memberikan makna terhadap narasi politik, kemudian menginternalisasikannya sebagai pemahaman mengenai realitas politik. Vuković dan Carpentier (2023) memperkuat perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang konstruksi realitas politik melalui interaksi antara aktor politik dan pengikutnya. Oleh karena itu, teori konstruksi sosial memungkinkan penelitian ini menjelaskan bagaimana kepercayaan politik Generasi Z terbentuk, dipertahankan, maupun dipertanyakan melalui pengalaman dan interaksi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan antara media digital, disinformasi, dan kepercayaan politik tidak selalu bersifat linear. Stachofsky et al. (2023) menemukan bahwa konsumsi berita dan orientasi politik berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap proses pemilu. Mont'Alverne et al. (2024) juga menunjukkan bahwa konsumsi berita, penggunaan platform digital, dan kepercayaan terhadap berita berperan dalam membentuk keyakinan terhadap misinformasi elektoral. Namun, Zhang et al. (2023), melalui penelitian longitudinal terhadap kaum muda di Hong Kong, menemukan bahwa pengaruh media terhadap political trust relatif terbatas dan seleksi individu terhadap sumber informasi turut menentukan pembentukan kepercayaan. Bahkan, Su dan Xiao (2022) menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap institusi

dapat berinteraksi dengan penggunaan media sosial politik dan diskusi politik sehingga mendorong keterlibatan kewargaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa disinformasi tidak selalu menghasilkan ketidakpercayaan atau apatisme, tetapi dapat memunculkan respons berupa skeptisisme, verifikasi, keterlibatan kritis, maupun penarikan diri dari politik.

Dari sisi metodologis, penelitian mengenai political trust dan media digital masih banyak didominasi pendekatan kuantitatif melalui survei, eksperimen, analisis longitudinal, dan meta-analisis. Zhang et al. (2023) menggunakan tiga gelombang survei dan cross-lagged model, sedangkan Su dan Xiao (2022) menguji hubungan penggunaan media sosial politik, diskusi politik, dan kepercayaan politik. Stachofsky et al. (2023) menganalisis hubungan konsumsi berita dan preferensi politik dengan kepercayaan terhadap proses pemilu. Sementara itu, Subekti et al. (2025) melalui pendekatan kualitatif studi kasus menunjukkan bahwa disinformasi dalam Pemilu Presiden Indonesia 2024 menyebar melalui berbagai platform media sosial berbasis video dan teks serta menyerang karakter maupun isu politik kandidat. Penelitian Susilo et al. (2024) juga memperlihatkan peran TikTok dalam membentuk komunikasi politik dan representasi kandidat pada Pemilu Indonesia 2024.

Dalam konteks Indonesia, Pemilu 2024 menjadi momentum penting yang mempertemukan tingginya penggunaan media sosial, keterlibatan pemilih muda, dan intensitas kontestasi narasi politik digital. Setelah pemilu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya keberadaan disinformasi, tetapi juga bagaimana pengalaman masyarakat dalam menghadapi informasi yang tidak pasti memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah, aktor politik, dan institusi demokrasi. Mahasiswa International Women University menjadi kelompok yang relevan untuk dikaji karena merupakan bagian dari Generasi Z yang intens berinteraksi dengan teknologi digital sekaligus memiliki posisi sebagai kelompok terdidik. Meskipun demikian, tingkat pendidikan tidak secara otomatis menjamin kemampuan mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh informasi politik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjektif mahasiswa dalam menerima, menafsirkan, menyaring, dan mengevaluasi informasi politik di media sosial.

Berdasarkan telaah tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menjelaskan proses konstruksi kepercayaan politik Generasi Z

setelah Pemilu 2024 melalui pengalaman mereka menghadapi disinformasi politik di media sosial, khususnya dalam lingkungan mahasiswa Indonesia. Penelitian sebelumnya cenderung menguji hubungan antara penggunaan media, disinformasi, dan political trust melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian lainnya lebih banyak menyoroti literasi digital, preferensi politik, dan partisipasi generasi muda. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari pengukuran pengaruh disinformasi terhadap kepercayaan politik menuju pemahaman mengenai proses sosial dan interpretatif yang menyebabkan kepercayaan politik dikonstruksi, dipertahankan, dinegosiasikan, atau dipertanyakan oleh Generasi Z dalam lingkungan informasi pasca Pemilu 2024.

Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dengan mahasiswa International Women University sebagai subjek penelitian. Kerangka teoritis menempatkan konstruksi sosial atas realitas sebagai grand theory, kepercayaan politik sebagai middle theory, serta media sosial, disinformasi, dan partisipasi politik sebagai applied theory. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Generasi Z mengonstruksi kepercayaan politik di tengah disinformasi politik pasca Pemilu 2024, memahami implikasi konstruksi tersebut terhadap kehidupan dan partisipasi politik, serta mengidentifikasi kemampuan kritis Generasi Z dalam menghadapi informasi politik. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian political trust dan demokrasi digital sekaligus memperkaya pemahaman empiris mengenai pembentukan kepercayaan politik generasi muda di tengah kompleksitas informasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dalam paradigma konstruktivisme. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami bagaimana Generasi Z membentuk, menafsirkan, mempertahankan, dan mempertanyakan kepercayaan politik ketika berhadapan dengan disinformasi politik pasca Pemilu 2024, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Aspers dan Corte (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses iteratif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena, sedangkan Yadav (2022) menekankan pentingnya kesesuaian antara paradigma, pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan

untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam menerima, menyaring, memverifikasi informasi politik, serta membentuk penilaian terhadap pemerintah dan institusi politik.

Desain penelitian diarahkan untuk mengkaji fenomena sosial-politik dalam konteks alami dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Fokus penelitian tidak hanya melihat kepercayaan politik sebagai sikap individual, tetapi sebagai proses sosial yang terbentuk melalui interaksi, pengalaman, dan pemaknaan terhadap informasi politik. Perspektif konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa mengonstruksi realitas politik berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media sosial. Dalam pelaksanaannya, koherensi antara landasan epistemologis, pengumpulan data, dan strategi analisis perlu dijaga, termasuk transparansi posisi peneliti selama proses penelitian (Olmos-Vega et al., 2022; Jamie & Rathbone, 2022).

Penelitian dilaksanakan di International Women University (IWU) dengan subjek mahasiswa yang termasuk dalam kelompok Generasi Z. Informan utama terdiri atas mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial dan mengikuti perkembangan politik, khususnya dinamika Pemilu 2024. Selain itu, penelitian melibatkan seorang dosen ilmu politik sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif akademik mengenai disinformasi dan kepercayaan politik. Secara keseluruhan, terdapat sembilan informan, yaitu delapan mahasiswa dan satu dosen ilmu politik. Informan mahasiswa berasal dari program studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Administrasi Bisnis, dan Informatika dengan tahun angkatan 2022–2024. Keragaman tersebut dimaksudkan untuk memperoleh variasi pengalaman dan perspektif dalam menghadapi informasi politik digital.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan mahasiswa meliputi mahasiswa aktif International Women University, termasuk Generasi Z, aktif menggunakan media sosial, serta mengikuti perkembangan politik pasca Pemilu 2024. Sementara itu, dosen ilmu politik dipilih sebagai informan pendukung berdasarkan kompetensi akademiknya. Ahmad dan Wilkins (2025) menjelaskan bahwa purposive sampling dalam penelitian kualitatif harus didasarkan pada relevansi karakteristik informan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, jumlah dan komposisi informan ditentukan berdasarkan relevansi serta kecukupan informasi yang diperoleh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara menjadi sumber data utama untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam memperoleh informasi politik, menemukan informasi yang dianggap tidak benar, melakukan verifikasi, serta menentukan kredibilitas informasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori dengan bentuk semi-terstruktur agar pembahasan tetap terarah sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan pengalaman dan pandangannya. Buschle et al. (2022) menjelaskan bahwa kualitas wawancara kualitatif sangat bergantung pada kemampuan instrumen dalam menghasilkan narasi yang relevan dengan fenomena penelitian.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi hasil wawancara. Dokumentasi mencakup catatan penelitian, dokumen, dan materi yang relevan dengan pengalaman informan terhadap informasi politik dan disinformasi. Penggunaan berbagai sumber data dilakukan untuk memperkuat kredibilitas temuan melalui triangulasi. Adler (2022) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dan refleksivitas peneliti berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas interpretasi. Dalam penelitian ini, informasi dari mahasiswa dibandingkan dengan perspektif dosen ilmu politik dan dokumentasi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan bertahap sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dibaca berulang untuk memahami keseluruhan pengalaman informan, kemudian direduksi dengan memilih dan mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian. Data dikategorikan ke dalam tema penggunaan media sosial, paparan disinformasi politik, verifikasi informasi, penilaian terhadap pemerintah, kepercayaan politik, dan partisipasi politik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola makna berdasarkan data yang diperoleh. Braun dan Clarke (2021) menyatakan bahwa analisis tematik merupakan pendekatan fleksibel untuk mengidentifikasi pola atau tema dalam data kualitatif yang penerapannya harus disesuaikan dengan paradigma dan tujuan penelitian. Byrne (2022) juga menekankan pentingnya analisis sistematis agar tema yang dihasilkan benar-benar berakar pada data.

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara deskriptif-interpretatif dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan pengalaman antar-informan. Kutipan langsung wawancara digunakan sebagai bukti empiris, sedangkan interpretasi peneliti menghubungkan temuan dengan konsep konstruksi sosial, kepercayaan politik, media

sosial, dan disinformasi. Perbedaan pandangan informan tetap dipertahankan untuk menunjukkan variasi proses konstruksi kepercayaan politik. Alam (2021) dan Byrne (2022) menegaskan bahwa analisis kualitatif tidak hanya menyajikan pernyataan informan, tetapi juga menjelaskan pola makna yang terbentuk dari keseluruhan data.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan informasi antar-informan, mengidentifikasi pola yang konsisten maupun kontradiktif, serta menghubungkannya dengan rumusan masalah. Kecukupan data diperhatikan melalui kedalaman informasi dan pengulangan tema yang muncul selama wawancara. Hennink dan Kaiser (2022) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dengan populasi relatif homogen dan tujuan terfokus dapat mencapai kecukupan informasi melalui jumlah wawancara yang terbatas, sepanjang data yang diperoleh relevan dan mendalam.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, pengecekan interpretasi, dokumentasi proses penelitian, dan refleksivitas peneliti. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi mahasiswa, perspektif dosen ilmu politik, dan dokumentasi. Adler (2022) menjelaskan bahwa trustworthiness penelitian kualitatif mencakup kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Sementara itu, Olmos-Vega et al. (2022) menekankan bahwa refleksivitas perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengenali pengaruh posisi, pengalaman, dan asumsi peneliti terhadap proses penelitian. Dengan demikian, keterlacakan analisis dijaga mulai dari transkripsi, reduksi, pengelompokan tema, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk memahami proses konstruksi kepercayaan politik Generasi Z melalui pengalaman menghadapi informasi dan disinformasi politik pasca Pemilu 2024. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, purposive sampling, wawancara mendalam, dokumentasi, analisis tematik, dan triangulasi memungkinkan penelitian menjelaskan bukan hanya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah, tetapi juga proses sosial dan interpretatif yang membentuk kepercayaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai proses konstruksi kepercayaan politik Generasi Z di tengah disinformasi politik pasca Pemilu 2024, dampaknya terhadap sikap dan partisipasi politik, serta keterkaitannya dengan pembentukan pola berpikir yang kritis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan mahasiswa

International Women University (IWU) sebagai informan utama dan satu dosen Ilmu Politik sebagai informan pendukung. Identitas informan disamarkan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan kesamaan dan perbedaan pengalaman informan, kemudian dianalisis melalui proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Program Studi	Tahun Angkatan	Keterangan
1	Informan 1	Laki-Laki	Ilmu Komunikasi	2022	Informan utama
2	Informan 2	Laki-Laki	Ilmu Politik	2022	Informan utama
3	Informan 3	Perempuan	Ilmu Politik	2023	Informan utama
4	Informan 4	Perempuan	Administrasi Bisnis	2023	Informan utama
5	Informan 5	Laki-Laki	Ilmu Politik	2024	Informan utama
6	Informan 6	Perempuan	Administrasi Bisnis	2024	Informan utama
7	Informan 7	Laki-Laki	Informatika	2023	Informan utama

Sumber: Data penelitian, diolah dari hasil wawancara.

Berdasarkan Tabel 1, informan mahasiswa terdiri atas lima laki-laki dan tiga perempuan. Dari sisi bidang studi, tiga informan berasal dari Ilmu Politik, dua dari Administrasi Bisnis, dua dari Informatika, dan satu dari Ilmu Komunikasi. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa fenomena konstruksi kepercayaan politik tidak hanya dialami oleh mahasiswa yang secara langsung mempelajari politik, tetapi juga oleh mahasiswa dari disiplin lain yang berinteraksi dengan informasi politik melalui ruang digital. Profil informan tersebut sesuai dengan karakteristik subjek yang ditetapkan dalam penelitian, yaitu mahasiswa Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan mengikuti perkembangan politik pasca Pemilu 2024.

Konstruksi Kepercayaan Politik Generasi Z di Tengah Disinformasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kepercayaan politik Generasi Z berlangsung melalui tahapan yang relatif bertahap, yaitu paparan informasi, pemaknaan, penyaringan, verifikasi, dan evaluasi. Media sosial menjadi pintu awal bagi sebagian besar informan untuk mengetahui perkembangan politik setelah Pemilu 2024. Platform yang disebutkan secara konsisten adalah TikTok, Instagram, X, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Media sosial diposisikan terutama sebagai sumber informasi awal, bukan selalu sebagai sumber final untuk menentukan kebenaran suatu informasi.

Informan 1, misalnya, mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan politik yang tinggi, tetapi tetap mengikuti perkembangan politik karena merasa sebagai mahasiswa perlu memiliki pengetahuan politik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi informasi politik tidak selalu lahir dari ketertarikan politik yang kuat, tetapi juga dari kesadaran sebagai mahasiswa untuk memahami lingkungan sosial dan politik. Dalam konteks ini, media sosial menyediakan akses yang cepat dan mudah terhadap isu politik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa paparan informasi merupakan tahap awal konstruksi realitas politik. Akan tetapi, paparan tidak secara otomatis menghasilkan kepercayaan. Informan justru menunjukkan kesadaran bahwa informasi yang muncul di media sosial dapat memiliki sumber yang tidak jelas, terpotong dari konteks, atau muncul berulang akibat mekanisme algoritma. Informan 2 secara khusus menyatakan bahwa perkembangan isu politik berlangsung sangat cepat sehingga pengguna harus mampu menyaring informasi yang diterima.

"Perkembangan isu politik itu cepet banget di media sosial, apalagi karena algoritma, jadi kita harus bisa memfilter informasi yang masuk."

Pernyataan tersebut menjadi salah satu temuan penting karena menunjukkan bahwa frekuensi kemunculan informasi tidak dipersepsikan sebagai indikator kebenaran. Informan menyadari bahwa algoritma dapat menyebabkan isu tertentu tampil berulang kali sehingga terlihat dominan dalam ruang informasi seseorang. Dengan demikian, proses konstruksi kepercayaan berlangsung bukan sekadar melalui *exposure*, tetapi melalui evaluasi terhadap bagaimana informasi tersebut diproduksi dan disebarkan.

Temuan ini sejalan dengan van Zoonen et al. (2024) yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan, penggunaan media sosial, dan informasi tidak sederhana. Kepercayaan tertentu bahkan dapat meningkatkan rasa percaya diri pengguna dalam mengenali informasi yang salah, sehingga proses autentikasi informasi tetap diperlukan. Studi tersebut menekankan pentingnya berpikir kritis dan literasi media dalam mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Pengalaman informan juga menunjukkan bahwa disinformasi masih menjadi bagian dari lingkungan politik pasca Pemilu 2024. Informan 6 menggambarkan situasi setelah pemilu dengan istilah "drama, fitnah, hoaks, sama buzzer", yang menunjukkan

bahwa pengalaman langsung terhadap informasi bermasalah menjadi bagian dari proses pembentukan sikap kritis terhadap informasi politik.

Informan tidak berhenti pada kesadaran bahwa disinformasi ada, tetapi mengembangkan praktik pengecekan silang. Informan 4 menjelaskan bahwa informasi yang diperoleh melalui Instagram atau TikTok biasanya diperiksa kembali melalui portal berita. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai sumber awal untuk menemukan isu, sedangkan sumber lain digunakan sebagai sarana validasi.

"Biasanya kalau dapat informasi dari Instagram atau TikTok, aku cek lagi ke portal berita."

Pola tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan politik Generasi Z dalam penelitian ini cenderung bersifat selektif dan evaluatif. Informasi tidak diterima hanya karena berasal dari media sosial, memiliki banyak interaksi, atau menjadi viral. Informasi yang lebih dipercaya adalah informasi yang memiliki sumber jelas, dapat dibandingkan dengan sumber lain, dan memiliki konteks yang lebih lengkap. Hasil keseluruhan wawancara memperlihatkan empat kecenderungan utama, yaitu media sosial sebagai sumber informasi, kesadaran terhadap keberadaan disinformasi, praktik penyaringan dan verifikasi, serta preferensi terhadap informasi yang memiliki sumber dan konteks yang jelas.

Temuan ini juga konsisten dengan Zhang et al. (2023), yang menunjukkan bahwa konsumsi berita melalui jaringan sosial personal memiliki hubungan dengan kepercayaan politik anak muda. Artinya, lingkungan sosial dan saluran informasi yang digunakan individu dapat berperan dalam pembentukan kepercayaan. Namun, penelitian ini menunjukkan tambahan penting bahwa mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh sumber informasi, melainkan secara aktif melakukan evaluasi terhadap sumber tersebut.

Pada konteks Pemilu 2024 Indonesia, temuan ini menjadi relevan karena penelitian Subekti et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran penting penyebaran disinformasi selama kontestasi Pemilu 2024, termasuk melalui serangan terhadap karakter kandidat dan isu politik pada platform seperti Facebook, YouTube, dan TikTok. Dengan demikian, pengalaman mahasiswa IWU berlangsung dalam ekosistem informasi politik yang memang memiliki karakter intensif, cepat, visual, dan rentan terhadap narasi yang tidak terverifikasi.

Informan 9 sebagai dosen Ilmu Politik memperkuat temuan mahasiswa. Menurutnya, intensitas disinformasi memang menurun dibandingkan masa kampanye, tetapi penyebarannya masih berlangsung setelah pemilu melalui YouTube, Facebook, TikTok, dan X. Konten politik yang singkat dan emosional dinilai masih menjadi karakteristik penting dalam lingkungan informasi pasca pemilu.

"Kalau dibandingkan dengan masa kampanye, intensitasnya memang menurun, tapi setelah pemilu masih tetap ada."

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembentukan kepercayaan politik Generasi Z berlangsung dalam lingkungan informasi yang tidak sepenuhnya stabil. Hal ini mendukung pandangan bahwa kepercayaan politik bukan sikap yang sepenuhnya statis. Devine dan Valgarðsson (2024), berdasarkan enam studi panel di lima negara, menunjukkan bahwa kepercayaan politik relatif stabil dalam jangka panjang, tetapi tetap memiliki potensi mengalami perubahan dalam jangka pendek sebagai respons terhadap konteks politik. Dalam konteks penelitian ini, paparan terhadap disinformasi dan pengalaman melakukan verifikasi menjadi bagian dari proses evaluasi yang dapat memengaruhi cara mahasiswa memberikan kepercayaan.

Dampak Disinformasi terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak disinformasi terhadap Generasi Z bersifat dua arah. Di satu sisi, disinformasi dapat menimbulkan keraguan, ketidakpercayaan, kejenuhan, dan kecenderungan menjauh dari isu politik. Di sisi lain, pengalaman menghadapi disinformasi dapat meningkatkan kehati-hatian, mendorong verifikasi, dan menghasilkan keterlibatan politik yang lebih selektif.

Perubahan paling jelas terlihat pada cara informan memperlakukan informasi. Informasi yang muncul di media sosial tidak lagi diterima secara langsung sebagai dasar pembentukan sikap. Informan cenderung memeriksa kembali informasi yang dianggap meragukan, membandingkannya dengan sumber lain, dan mempertimbangkan konteks informasi sebelum memberikan kepercayaan. Informan 4, misalnya, secara konsisten menggunakan mekanisme *cross-check* antara media sosial dan portal berita.

Temuan mengenai dampak ganda tersebut penting karena penelitian ini tidak menemukan bahwa disinformasi secara otomatis menyebabkan hilangnya kepercayaan politik. Informan 5 secara eksplisit menyatakan bahwa setelah Pemilu 2024 dirinya

menjadi lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi politik, tetapi kehati-hatian tersebut tidak berarti hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

"Kalau dibandingkan sebelum pemilu 2024, sekarang saya menjadi lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi politik. Bukan berarti saya tidak percaya kepada pemerintah, tetapi saya lebih kritis dalam melihat suatu isu."

Temuan tersebut menunjukkan pergeseran dari kepercayaan langsung menuju kepercayaan bersyarat dan evaluatif. Mahasiswa tetap dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah, tetapi kepercayaan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap informasi, kinerja, dan tindakan nyata. Pola ini memperlihatkan bahwa sikap kritis tidak identik dengan ketidakpercayaan total.

Secara konseptual, hasil tersebut sejalan dengan Devine (2024), yang menunjukkan bahwa kepercayaan politik memiliki hubungan dengan berbagai bentuk perilaku politik, termasuk partisipasi elektoral, tetapi hubungan tersebut relatif kecil hingga moderat dan bergantung pada konteks. Sementara itu, Su dan Xiao (2022) menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial politik, diskusi politik, kepercayaan politik, dan keterlibatan kewargaan dapat berbeda menurut konteks sosial-politik. Hal tersebut mendukung temuan penelitian ini bahwa paparan disinformasi tidak menghasilkan respons tunggal.

Dalam penelitian ini, partisipasi politik Generasi Z tidak hanya dipahami melalui aktivitas formal seperti pemilu, tetapi juga melalui perhatian terhadap isu politik, pencarian informasi, pemantauan kebijakan pemerintah, pembentukan pendapat, dan penentuan sikap politik. Informan 1 menunjukkan bahwa meskipun ketertarikannya terhadap politik relatif rendah, ia tetap merasa perlu "melek politik". Di sisi lain, informan 6 mengungkapkan bahwa banyaknya isu politik yang beredar dapat menurunkan kepercayaan kepada pemerintah sekaligus mengurangi keinginannya untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, penelitian menemukan dua kemungkinan jalur. Jalur pertama terjadi ketika disinformasi diterima tanpa verifikasi sehingga menghasilkan kebingungan, ketidakpercayaan, kejenuhan, dan kemungkinan penarikan diri dari isu politik. Jalur kedua terjadi ketika individu mengenali disinformasi dan melakukan verifikasi sehingga tetap terlibat dalam politik, tetapi dengan pola yang lebih kritis dan selektif. Dalam pengalaman informan penelitian, jalur kedua lebih dominan.

Temuan ini memberikan nuansa terhadap studi Mont'Alverne et al. (2024) yang menunjukkan bahwa konsumsi berita dan kepercayaan terhadap institusi berita berhubungan dengan keyakinan terhadap misinformasi elektoral, sementara keyakinan terhadap misinformasi elektoral pada gilirannya dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi berita. Dengan kata lain, hubungan antara disinformasi dan kepercayaan bersifat timbal balik dan tidak linear. Penelitian pada mahasiswa IWU memperlihatkan bahwa pengalaman menghadapi disinformasi juga dapat memunculkan respons adaptif berupa peningkatan kehati-hatian.

Hasil ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Stachofsky et al. (2023), yang menemukan bahwa jenis berita yang dikonsumsi dan afiliasi politik memengaruhi persepsi terhadap proses pemilu. t Sementara itu, Mari et al. (2022) menunjukkan bahwa keyakinan konspiratif dapat berhubungan negatif dengan kepercayaan institusional, tetapi penggunaan media sosial secara aktif dapat mengurangi sebagian dampak negatif tersebut. Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa kualitas informasi dan cara individu berinteraksi dengan informasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah paparan informasi menghasilkan ketidakpercayaan atau keterlibatan yang lebih kritis.

Konstruksi Kepercayaan Politik dalam Perspektif Konstruksi Sosial

Jika dilihat melalui teori konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann yang digunakan dalam penelitian, temuan lapangan memperlihatkan adanya tiga proses yang saling berkaitan. Eksternalisasi terlihat ketika mahasiswa berinteraksi dengan informasi politik melalui media sosial, mengikuti isu politik, membaca konten, serta memberikan respons terhadap isu yang berkembang. Objektivasi muncul ketika narasi politik yang berulang memperoleh posisi penting dalam lingkungan informasi dan mulai dipandang sebagai gambaran mengenai realitas politik. Selanjutnya, internalisasi berlangsung ketika mahasiswa mengolah informasi tersebut menjadi persepsi dan keyakinan pribadi mengenai pemerintah, aktor politik, maupun sistem politik. Kerangka tersebut memang telah dirumuskan dalam tesis sebagai dasar untuk memahami proses konstruksi kepercayaan politik Generasi Z.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berlangsung secara pasif. Mahasiswa dapat menolak informasi yang dianggap meragukan, membandingkan sumber, dan mengevaluasi kembali pemahaman yang telah terbentuk.

Dengan demikian, internalisasi tidak selalu berarti menerima realitas yang ditawarkan oleh lingkungan digital secara utuh. Individu dapat melakukan negosiasi makna sebelum menjadikan informasi sebagai dasar kepercayaan politik.

Hal tersebut penting dalam konteks media sosial karena viralitas suatu informasi tidak selalu identik dengan validitasnya. Hunter (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara media sosial, disinformasi, dan demokrasi memiliki konsekuensi yang kompleks dan perlu dilihat berdasarkan tipe penggunaan media sosial serta konteks politik. Dalam konteks Indonesia, Susilo et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya TikTok dalam komunikasi politik Pemilu 2024, memperlihatkan bahwa platform digital telah menjadi bagian penting dari lingkungan politik kontemporer Indonesia.

Konstruksi Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Evaluasi Kinerja

Temuan lain menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak semata-mata dibangun berdasarkan informasi mengenai tokoh politik. Informan juga memperhatikan tindakan, kebijakan, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Informan 4 menyatakan bahwa dirinya memantau perkembangan politik melalui media sosial, kemudian melakukan *cross-check* melalui portal berita dan memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan yang dampaknya dirasakan masyarakat.

Informan 6 juga menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah perlu dilihat dari kesesuaian antara janji politik dan tindakan setelah memperoleh jabatan. Dengan demikian, konstruksi kepercayaan tidak hanya bergantung pada narasi politik yang beredar, tetapi juga pada evaluasi terhadap realitas empiris pemerintahan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan politik Generasi Z dalam penelitian ini memiliki karakter kritis, selektif, dan evaluatif. Kepercayaan tidak hilang hanya karena terdapat disinformasi, tetapi menjadi lebih bersyarat: informasi harus diperiksa, sumber harus dipertimbangkan, konteks harus dipahami, dan kinerja pemerintah harus dievaluasi. Temuan tersebut juga sejalan dengan Gvozdanović dan Stanojević (2026), yang menunjukkan bahwa kualitas kinerja institusi dan kepuasan terhadap demokrasi merupakan faktor penting dalam pembentukan kepercayaan politik generasi muda.

Kontribusi terhadap Pola Berpikir Entrepreneur Generasi Z

Meskipun bukan fokus utama judul artikel, penelitian juga menemukan implikasi tambahan bahwa proses menghadapi disinformasi berhubungan dengan pembentukan kemampuan yang relevan dengan visi entrepreneur IWU. Temuan tersebut terutama berupa kemampuan menganalisis informasi, melakukan verifikasi, melihat persoalan dari berbagai perspektif, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Informan 5 secara eksplisit mengaitkan sikap kritis dalam menghadapi informasi politik dengan kebutuhan untuk menganalisis informasi dan mengambil keputusan dalam dunia kerja maupun bisnis.

Informan 7 juga menekankan bahwa sikap kritis tidak sekadar keberanian menyampaikan pendapat, tetapi membutuhkan penilaian yang objektif dan berimbang dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, informan 6 mengaitkan kemampuan menyaring informasi dengan tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Dengan demikian, pengalaman menghadapi disinformasi tidak hanya menghasilkan respons politik, tetapi juga membentuk pola pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap kritis memiliki sisi ganda. Informan 4 mengungkapkan bahwa pengalaman menghadapi hoaks membuat dirinya lebih kritis dan tidak mudah dibohongi, tetapi banyaknya informasi yang simpang siur juga dapat menyebabkan kejenuhan dan keengganan untuk membicarakan politik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat diringkas dalam sebuah alur proses bahwa paparan informasi digital → interaksi dan pemaknaan → penyaringan dan verifikasi → evaluasi informasi dan kinerja politik → konstruksi kepercayaan → pola partisipasi politik. Disinformasi berada di sepanjang proses tersebut sebagai kondisi yang dapat mengganggu pembentukan kepercayaan, tetapi sekaligus dapat memicu mekanisme pertahanan berupa verifikasi dan berpikir kritis.

Dengan demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa Generasi Z di International Women University tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai kelompok yang rentan terhadap disinformasi. Mereka memang berada dalam lingkungan informasi yang intensif dan berisiko, tetapi sebagian besar informan menunjukkan kapasitas untuk melakukan verifikasi dan evaluasi. Posisi tersebut menghasilkan bentuk kepercayaan politik yang lebih bersyarat: kepercayaan diberikan ketika informasi dinilai memiliki dasar yang memadai dan ketika tindakan politik pemerintah dianggap sesuai dengan

harapan publik. Pada saat yang sama, disinformasi yang terus-menerus dapat menimbulkan keraguan dan kejenuhan yang berpotensi mengurangi partisipasi politik. Dengan kata lain, tantangan utama bukan hanya keberadaan disinformasi, tetapi kemampuan individu mengubah paparan informasi menjadi pengetahuan yang telah diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar membentuk kepercayaan dan tindakan politik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan politik Generasi Z di International Women University (IWU) tidak terbentuk secara langsung dari informasi politik yang diterima, tetapi melalui proses penerimaan, pemaknaan, penyaringan, verifikasi, dan evaluasi. Media sosial menjadi sumber awal informasi politik, tetapi mahasiswa tidak sepenuhnya menerima informasi tersebut secara pasif. Mereka membandingkan sumber, memeriksa konteks, dan mempertimbangkan kinerja serta kebijakan pemerintah sebelum membentuk penilaian politik. Dengan demikian, disinformasi tidak selalu menghilangkan kepercayaan politik, tetapi mengubah cara Generasi Z memberikan dan mempertahankan kepercayaan.

Bagi pemerintah, peningkatan political trust perlu dilakukan melalui keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan penyediaan informasi publik yang akurat serta mudah diverifikasi. Informasi resmi yang jelas dapat mengurangi ruang berkembangnya disinformasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Bagi Generasi Z, pengalaman menghadapi disinformasi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membandingkan sumber, mempertimbangkan bukti, dan mengambil keputusan secara lebih rasional. Kemampuan tersebut juga memiliki relevansi dengan pengembangan kapasitas akademik, profesional, dan kewirausahaan. Namun, hubungan dengan kewirausahaan dalam penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai implikasi potensial, bukan hubungan kausal yang telah terbukti.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang berasal dari satu perguruan tinggi. Oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasi secara statistik kepada seluruh Generasi Z di Indonesia. Data juga bergantung pada pengalaman dan kemampuan informan dalam mengingat serta

menjelaskan pengalaman mereka menghadapi disinformasi. Selain itu, penelitian bersifat potret pada periode pasca Pemilu 2024 sehingga belum menjelaskan perubahan political trust dalam jangka panjang.

Penelitian selanjutnya dapat melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan wilayah, menggunakan pendekatan *mixed methods*, serta melakukan penelitian longitudinal untuk melihat perubahan political trust dari waktu ke waktu. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan karakteristik berbagai platform seperti TikTok, Instagram, X, YouTube, dan Facebook, serta menguji pengaruh tingkat literasi digital, intensitas konsumsi media, orientasi politik, dan karakteristik informasi terhadap pembentukan kepercayaan politik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi politik tidak secara otomatis menghancurkan kepercayaan politik Generasi Z. Dampaknya bergantung pada bagaimana informasi diproses. Disinformasi yang diterima tanpa verifikasi dapat menghasilkan keraguan, skeptisisme, penurunan kepercayaan, dan apatisme. Sebaliknya, disinformasi yang dihadapi melalui proses verifikasi dan evaluasi dapat mendorong terbentuknya kepercayaan yang lebih kritis, selektif, dan evaluatif. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Generasi Z bukan hanya objek yang rentan terhadap disinformasi, tetapi juga aktor yang mampu melakukan negosiasi makna dan membangun kembali kepercayaan politik berdasarkan sumber, konteks, bukti, dan kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi kepercayaan politik Generasi Z di International Women University terbentuk melalui proses penerimaan, pemaknaan, penyaringan, verifikasi, dan evaluasi terhadap informasi politik, terutama yang diperoleh melalui media sosial. Kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh informasi yang beredar, tetapi juga oleh penilaian terhadap sumber informasi, kesesuaian dengan fakta, kinerja, transparansi, dan kebijakan pemerintah. Disinformasi dapat menimbulkan keraguan dan skeptisisme apabila diterima tanpa verifikasi, tetapi juga dapat mendorong Generasi Z menjadi lebih kritis dan selektif. Dampaknya terhadap partisipasi politik bersifat beragam, yaitu dapat mendorong keterlibatan politik yang lebih kritis, tetapi juga berpotensi menimbulkan apatisme ketika ketidakpercayaan berkembang secara berlebihan.

Konstruksi kepercayaan politik tersebut juga berkontribusi terhadap penguatan visi entrepreneur Generasi Z melalui berkembangnya kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, membandingkan sumber, mempertimbangkan fakta, dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati. Dengan demikian, kepercayaan politik Generasi Z pasca Pemilu 2024 cenderung bersifat kritis, selektif, dan evaluatif, bukan sekadar percaya atau tidak percaya. Pengalaman menghadapi disinformasi menjadi faktor yang dapat menentukan apakah Generasi Z mengalami penurunan kepercayaan dan penarikan diri dari politik atau justru membangun keterlibatan politik yang lebih selektif serta kemampuan analitis yang relevan dengan karakter entrepreneur.

DAFTAR PUSTAKA

Adler, R. H. (2022). Trustworthiness in qualitative research. *Journal of Human Lactation, 38*(4), 598–602. https://doi.org/10.1177/08903344221116620

Ahmad, S., & Wilkins, S. (2025). [Artikel sesuai sumber yang digunakan dalam naskah]. *Quality & Quantity*. https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5

Alam, M. K. (2021). A systematic qualitative case study: Questions, data collection, NVivo analysis and saturation. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 16*(1), 1–31. https://doi.org/10.1108/QROM-09-2019-1825

Aspers, P., & Corte, U. (2021). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology, 44*, 599–608. https://doi.org/10.1007/s11133-021-09497-w

Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology, 18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Buschle, C., Reiter, H., & Bethmann, A. (2022). The qualitative pretest interview for questionnaire development: Outline of programme and practice. *Quality & Quantity, 56*, 823–842. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01156-0

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity, 56*, 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Devine, D. (2024). Does political trust matter? A meta-analysis on the consequences of trust. *Political Behavior, 46*(4), 2241–2262. https://doi.org/10.1007/s11109-024-09916-y

Devine, D., & Valgarðsson, V. O. (2024). Stability and change in political trust: Evidence and implications from six panel studies. *European Journal of Political Research, 63*(2), 478–497. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12606

Fernández Muñoz, C., Rubio Moraga, Á. L., & Álvarez Rivas, D. (2024). Generation Z vs. misinformation: Perceptions and practices in the digital age. *Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 30*(3), 517–529. https://doi.org/10.5209/emp.96511

Gvozdanović, A., & Stanojević, D. (2026). The origins of the youth's political trust in Southeastern Europe. *Southeast European and Black Sea Studies, 26*(1), 45–64. https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2378546

Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine, 292*, 114523. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523

Hunter, L. Y. (2023). Social media, disinformation, and democracy: How different types of social media usage affect democracy cross-nationally. *Democratization, 30*(6), 1040–1072. https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2208355

Jamie, K., & Rathbone, A. P. (2022). Using theory and reflexivity to preserve methodological rigour of data collection in qualitative research. *Research Methods in Medicine & Health Sciences, 3*(1), 11–21. https://doi.org/10.1177/26320843211061302

Mari, S., Gil de Zúñiga, H., Suerdem, A., Hanke, K., Brown, G., Vilar, R., Boer, D., & Bilewicz, M. (2022). Conspiracy theories and institutional trust: Examining the role of uncertainty avoidance and active social media use. *Political Psychology, 43*(2), 277–296. https://doi.org/10.1111/pops.12754

Mont'Alverne, C., Ross Arguedas, A., Banerjee, S., Toff, B., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2024). The electoral misinformation nexus: How news consumption, platform use, and trust in news influence belief in electoral misinformation. *Public Opinion Quarterly, 88*(S1), 681–707. https://doi.org/10.1093/poq/nfae019

Olmos-Vega, F. M., Stalmeijer, R. E., Varpio, L., & Kahlke, R. (2022). A practical guide to reflexivity in qualitative research: AMEE Guide No. 149. *Medical Teacher, 44*(3), 241–251. https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2057287

Stachofsky, J., Schaupp, L. C., & Crossler, R. E. (2023). Measuring the effect of political alignment, platforms, and fake news consumption on voter concern for election

processes. *Government Information Quarterly, 40*(3), 101810. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101810

Su, Y., & Xiao, X. (2022). Interacting effects of political social media use, political discussion and political trust on civic engagement: Extending the differential gains model. *International Communication Gazette, 84*(3), 206–226. https://doi.org/10.1177/1748048521993118

Subekti, D., Yusuf, M., Saadah, M., & Wahid, M. (2025). Social media and disinformation for candidates: The evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science, 7*, 1625535. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535

Susilo, M. E., Pawito, Purwasito, A., & Rahmanto, A. N. (2024). TikTok's influence on Indonesia's 2024 election: From general to "gemoy." *Asian Politics & Policy, 16*(4), 595–599. https://doi.org/10.1111/aspp.12764

van Zoonen, W., Luoma-aho, V., & Lievonen, M. (2024). Trust but verify? Examining the role of trust in institutions in the spread of unverified information on social media. *Computers in Human Behavior, 150*, 107992. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107992

Vuković, S., & Carpentier, N. (2023). The vertical and horizontal dimensions in the social construction of leadership: A case study on the social media followers of the Croatian politicians Zoran Milanović and Miro Bulj. *Leadership, 19*(6). https://doi.org/10.1177/17427150231202557

Yadav, [inisial penulis]. (2022). [Artikel sesuai sumber yang digunakan dalam naskah]. *[Nama jurnal]*. https://doi.org/10.1007/s40299-021-00619-0

Zhang, Y., Tian, Z., Zhou, Z., Huang, J., & Zhu, A. Y. F. (2023). Intention to consume news via personal social media network and political trust among young people: The evidence from Hong Kong. *Frontiers in Psychology, 13*, 1065059. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1065059